BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, termasuk di antaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan.

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik **(Mardiasmo, 2005; 61).** Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.

Reformasi anggaran daerah dimulai dengan penyusunan anggaran daerah yang tidak lagi mengacu kepada ***PP No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah***, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Perubahan kebijakan tentang anggaran terjadi mengikuti perubahan kebijakan pengelolaan keuangan negara.

Salah satu bentuk perubahan kebijakan tersebut dengan mulai diberlakukannya **PP No. 105 Tahun 2000 (Yuwono dkk, 2005: 64)**, selanjutnya diganti dengan **PP No. 58 Tahun 2005**, yang diikuti dengan diterbitkannya **Permendagri No. 13 Tahun 2006**. Terjadinya perubahan paradigma sesuai dengan amanat UU Otoda menuntut adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran sehingga akan memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran **(Sopanah, 2004).**

Dalam **UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional** mekanisme partisipasi penganggaran sudah diatur sedemikian rupa yang kemudian diperjelas dalam **Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002** yang sekarang di revisi menjadi **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006.**

Serta melalui Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Dalam Negeri No. 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ yang inti dari keempat peraturaan tersebut adalah mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan. **Permendagri 13 Tahun 2006 sekarang direvisi menjadi Permendagri 59 Tahun 2007**.

Achmadi dkk (2002) menegaskan, bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi sebuah pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak yang terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan **Sisk (2002).**

Sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan umum yang berlaku dalam akuntansi, adapun pelaksanaan penelitian ini menyesuaikan dengan keadaan di lingkungan BAPPEDA Kota Bandung, dengan partisipatif para pelaksana yang ada didalamnya untuk mampu bekerjasama dengan baik diantara satu sama lain termasuk masyarakat yang ada di daerah Kota Bandung.

Setiap kegiatan yang ada di BAPPEDA tidak berpacu kepada pencapaian keuntungan atau laba maksimal, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya, karena BAPPEDA merupakan suatu Kewenangan Daerah yang mampu diartikan keberadaannya dalam lembaga Bappedanya itu sendiri, di masing-masing daerah yang disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja.

Sistem akuntansi dikonsentrasikan pada sub bidang Penganggaran Partisipatif. Penulis mengharapkan adanya suatu keselarasan antara teori yang di dapat selama studi dengan prakteknya. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin membahasnya dalam laporan Kerja Praktek dengan memberi judul :

“ PROSEDUR PENGANGGARAN PARTISIPATIF PADA BAPPEDA KOTA BANDUNG ‘’

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari laporan kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penyusunan Renja SKPD dan RKA-SKPD di BAPPEDA Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pengaggaran Partisipatif yang ada pada BAPPEDA Kota Bandung

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai Tugas dan Fungsi Sub Bagian Program yang ada pada BAPPEDA khususnya dalam melaksanakan program kegiatan Musrenbang yang merupakan salah satu perencanaan partisipatif dari masyarakat di Kota Bandung.

2. Bagi Sub Bidang Program Bappeda Kota Bandung

   Memberikan masukan bagi Sub Bagian Program khususnya pada kegiatan Musrenbang di BAPPEDA Kota Bandung, mengenai kelemahan/kekurangan khususnya mengenai Prosedur Penganggaran Partisipatif, sehingga kelemahan/kekurangan tersebut dapat diperbaiki.

3. Bagi Pembaca

   Menambah informasi mengenai Prosedur Penganggaran Partisipatif yang digunakan pada Sub Bagian Program Khususnya Kegiatan Musrenbang di BAPPEDA Kota Bandung.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan penulis dalam laporan kerja praktek ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan masalah berdasarkan fakta yang ada untuk diolah menjadi informasi dan dijelaskan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset lapangan, dengan cara:

1. Wawancara

   Dalam pencarian data untuk laporan Kerja Praktek ini, Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Tamsil dan Bapak Adhitya selaku pelaksana pada Bagian Program khsusunya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), yang mengurus tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan dilaksanakan dalam koridor perencanaan pembangunan partisipatif, melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

2. Dokumentasi

   Penulis juga mencari informasi yang dibutuhkan tentang Prosedur Penganggaran Partisipatif yang ada di BAPEDDA Kota Bandung, yang diberikan oleh pelaksana seperti alur perencanaan dan pengaggaran RKPD, file tentang sejarahnya BAPPEDA, Buku peraturan UUD RI

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, serta tugas pokok dan fungsi yang ada pada BAPPEDA Kota Bandung.

3. Studi kepustakaan

Selain kedua cara yang telah dijelaskan di atas, Penulis juga mengumpulkan data melalui buku, jurnal dan browsing internet untuk mengutip teori-teori tentang Penganggaran Partisipatif.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kerja Praktek ini dilaksanakan pada Sub Bagian Program khususnya kegiatan Musrenbang di BAPPEDA Kota Bandung, yang berlokasi di Jl.Taman Sari No 76 Bandung, Jawa Barat. Waktu pelaksanaannya yaitu dari tanggal 4 Juli 2011 sampai tanggal 29 Juli 2011, dengan jam kerja hari senin sampai hari jumat pukul 08.00-14.30.

Tabel Uraian Kerja Praktek

Pada BAPPEDA Kota Bandung

Uraian Kerja	Minggu 1 Senin-Jumat	Minggu 2 Senin-Jumat	Minggu 3 Senin-Jumat	Minggu 4 Senin-Jumat
Pengurusan Surat KP dan Penempatan KP				
Menginput Data Kegiatan Program				
Mengikuti Rapat Kerja di Bappeda				
Mengajukan Judul Laporan KP				
Pencarian dan Penyusunan Data Laporan KP				
Melakukan Bimbingan dengan Pembimbing Instansi				
Pengurusan Surat Selesai KP dan Pemberian Nilai				

Tabel Uraian Berita Acara Bimbingan Kerja Praktek

Dengan Dosen Pembimbing

Uraian Kerja	Bulan September 2011	Bulan Oktober 2011	Bulan November 2011	Bulan Desember 2011
Pengajuan Kerja Praktek, Pengajuan Judul dan Revisi Judul.				
Pengerjaan Laporan Bab I dan Revisi.				
Pengerjaan Laporan Bab II dan Revisi.				
Pengerjaan Laporan Bab III, IV dan Revisi .				
Melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing				
Ujian Laporan Kerja Praktek				